

Evaluasi Program Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Studi Kasus Pada Ibu Hamil di Puskesmas Lengko Ajang Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur

Diniana Kesung¹⁾, Sapto Pramono²⁾, Suroso³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: jebarusdini@gmail.com

ABSTRAK

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kejadian KIA bisa terjadi dimulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan, 2016). Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan kendala KIA di Puskesmas Lengko Ajang, Kecamatan Congkar yaitu penyebabnya adalah karena ibu tidak memiliki akses terhadap makanan sehat dan bergizi sehingga menyebabkan anak turut kekurangan nutrisi. Selain itu, rendahnya asupan vitamin dan mineral yang dikonsumsi ibu juga bisa ikut memengaruhi kondisi malnutrisi janin. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi menurut Wiliam N. Dunn yaitu menggunakan dua indikator diantaranya kebijakan dan konteks evaluasi dan menggunakan metode kualitatif deskriptif hasil. Peneliti memberikan kesimpulan analisis terkait dengan isi kebijakan dapat dikatakan bahwa di Kecamatan Congkar belum berhasil secara optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu terlalu banyak mengkonsumsi makanan instan dan kurangnya pendidikan orang tua sehingga berdampak kepada anak. Tentang konteks evaluasinya di Puskesmas Lengko Ajang dalam proses evaluasi kebijakan program KIA dapat dikatakan tidak ada kendala di pembentukan pos gizi di setiap desa serta emberi bantuan berupa telur, susu, kacang-kacangan, pemberian biskuit balita, dan bumil. Saran ke puskesmas yaitu lebih sering mengadakan sosialisasi terkait program KIA.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, KIA, Puskesmas

Abstract

Health is a state of physical, mental and social well-being that enables every person to live a socially and economically productive life. MCH incidents can occur starting from when the fetus is still in the womb and only become visible when the child is two years old (Ministry of Health, 2016). Based on initial observations made by researchers, they found that the problem with MCH at the Lengko Ajang Community Health Center, Congkar District was that the cause was because mothers did not have access to healthy and nutritious food, causing children to also lack nutrition. Apart from that, low intake of vitamins and minerals consumed by the mother can also influence the condition of fetal malnutrition. The theory used is evaluation theory according to Wiliam N. Dunn, namely using two indicators including policy and evaluation context and using a descriptive qualitative method of results. The researcher provides analytical conclusions related to the content of the policy, it can be said that in Congkar District it has not been optimally successful due to several factors, namely consuming too much instant food and lack of parental education, which has an impact on children. Regarding the context of the evaluation at the Lengko Ajang Community Health Center in the process of evaluating the KIA program policy, it can be said that there were no obstacles in establishing nutrition posts in each village and providing assistance in the form of eggs, milk, nuts, giving toddler biscuits and pregnant women. The suggestion to the community health center is to hold more frequent outreach related to the KIA program..

Keywords: Policy Evaluation, KIA, Community Health Center

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization* (WHO) merumuskan dalam cakupan yang sangat luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang sampai saat ini masih memerlukan perhatian pemerintah yaitu pelayanan di bidang kesehatan terutama pelayanan terhadap ibu dan anak.

Program kesehatan ibu dan anak yang sering disebut sebagai program KIA, adalah suatu program untuk mengupayakan sebuah layanan kesehatan yang ditujukan untuk ibu dan anak, khususnya dalam menjaga dan memelihara kesehatan ibu hamil, bersalin dan menyusui serta kesehatan bayi dan anak prasekolah. Yang termasuk pelayanan KIA-KB ini misalnya pemeriksaan kehamilan (ANC), nifas, pengobatan bayi dan balita, imunisasi, DDTK, kesehatan reproduksi remaja termasuk calon pengantin, pelayanan KB pil, kondom, suntik, IUD, dan implan. KIA sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, karena berisi informasi kesehatan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan meliputi imunisasi, gizi seimbang, dan vitamin A.

Program KIA telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri yang mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021. Permenkes 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi dari program kebijakan ibu hamil, diantaranya:

1. Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis.
2. Memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan kasus fisiologis.
3. Melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil.

4. Memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan.
5. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF1).
6. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan (KF2).
7. Melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan (KF3).
8. Melakukan pendataan sasaran pada individu (WUS atau PUS atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah.
9. Melakukan tabulasi sasaran pada individu (WUS atau PUS atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita).

Di Indonesia sendiri hampir 300 ribu perempuan meninggal selama dan setelah kemahilan serta persalinan pada tahun 2017. Demikian pula, sekitar 5 juta anak balita meninggal setiap tahun. Penyediaan pemeriksaan antenatal berkualitas tinggi dan teratur selama kehamilan kemungkinan akan menentukan status kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan ketersediaan layanan esensial bagi ibu dan anak.

Terdapat lima provinsi di Indonesia yang menyumbang hampir 50 persen dari total angka kematian ibu dan bayi, karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk yang besar (Menurut Direktur Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, dr Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, dalam acara seminar Hospital Expo di JCC, pada Rabu, 19 Oktober 2011. Untuk angka kematian bayi, provinsi yang paling banyak menyumbang diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Sedangkan untuk penyumbang angka kematian ibu yang paling banyak yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan NTT.

Berdasarkan permasalahan di atas program KIA muncul sebagai solusi dari permasalahan yang mana masih rendahnya upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan

kesehatan terhadap masyarakat serta tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2020 jumlah kematian ibu di NTT sebanyak 149 kasus dan angka kematian bayi baru lahir mencapai 744 kasus, sedangkan angka stunting mencapai 24,2%.

Kecamatan Congkar adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang dimana berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di puskesmas Lengko Ajang mendapatkan informasi bahwa kurang-nya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini kehamilan. Sehingga, dampaknya tidak terdeteksi adanya komplikasi pada ibu hamil. Keterlambatan ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah.

Berdasarkan dari fenomena diatas maka peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah di atas dengan mengambil judul “Evaluasi Program Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Studi Kasus Pada Ibu Hamil Puskesmas Lengko Ajang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur”.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009:18) kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik ke ranah upaya pemecahan masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Pengertian di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan ke depan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta

menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Riant Nugroho (2003:51) kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan yang bersama yang dicita-citakan, jadi jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan. Maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat dan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

2. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2000: 24), dalam tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

a) Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruangan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik. Maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

b) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakanyang diambil untuk memecahkan masalah.

c) Adopsi atau Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah, namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

3. Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para implementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat

diterapkan dengan sukses (Schnider dan Ingram, 2017).

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan. Mereka menekankan bahwa tahapan implementasi baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuatsesuai struktur implementasi. Suatu desain kebijakan yang berbeda dapat memengaruhi implementasi dalam skala lebih luas. Implementasi kebijakan juga erat kaitannya dengan wujud pelaksanaan dalam mempertanyakan kebijakan yang dilaksanakan dalam mewujudkan adanya sebuah pembuatan prosedur implementasi kebijakan yang sesuai dengan alokasi sumber daya untuk dapat dikembalikan pengimplementasiannya sesuai dengan evaluasi implementasi yang diterapkan (Nugroho, 2016).

4. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, sebab evaluasi yang dilakukan terlalu dini maka outcomedan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan (Subarsono, 2005).

5. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2009:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a) Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar keberhasilan atau kegagalan program.

b) Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c) Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

d) Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

6. Model Evaluasi Kebijakan

Untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program menurut Dunn (2003) diperlukan adanya kriteria sebagai berikut:

a) Efektivitas

Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu,

menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, yaitu hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c) Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

d) Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

e) Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

7. Kesehatan Ibu Hamil

Status gizi ibu sejak sebelum hamil hingga hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan sehingga berpengaruh pada kualitas bayi yang dilahirkan. Ibu yang memiliki gizi yang normal akan meningkatkan peluang untuk melahirkan bayi yang sehat dan memiliki berat badan lahir yang normal (Dewantoro dan Muniroh, 2017). Resiko yang ditimbulkan dari ibu hamil anemia adalah bayi yang dilahirkan juga akan mengalami anemia defisiensi Fe yang jika dibiarkan akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan menjadi terhambat (Kemenkes RI, 2015).

Tujuan program KIA adalah tercapainya kemampuan hidup sehat melalui

peningkatan derajat kesehatan yang optimal, bagi ibu dan keluarganya untuk menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang optimal yang merupakan landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya (Wijono, 2012).

8. Prinsip Pengelolaan Program KIA

Prinsip pengelolaan program KIA adalah memantapkan dan peningkatan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Pelayanan KIA diutamakan pada kegiatan pokok:

- a) Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan dengan mutu yang baik serta jangkauan yang setinggi-tingginya.
- b) Peningkatan pertolongan persalinan yang lebih ditujukan kepada peningkatan pertolongan oleh tenaga profesional secara berangsur.
- c) Peningkatan deteksi dini resiko tinggi ibu hamil, baik oleh tenaga kesehatan maupun di masyarakat oleh kader dan dukun bayi serta penanganan dan pengamatannya secara terus menerus.
- d) Peningkatan pelayanan neonatal (bayi berumur kurang dari 1 bulan) dengan mutu yang baik dan jangkauan yang setinggi tingginya.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut para ahli Sugiyono (2003:19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral.dalam (Hutami, 2017).

Menurut Husaini dan Purnomo, (2009:130) pendekatan diskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai

dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi. Oleh karena itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diperoleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu evaluasi program kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Lengko Ajang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Yang menjadi fokus kajian penelitian yaitu permasalahan mengenai apa saja yang terjadi pada proses evaluasi kebijakan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) studi kasus pada ibu hamil di Puskesmas Lengko Ajang.

Kemudian yang menjadi fokus penelitian kedua adalah penelitian berfokus pada manfaat apa yang diterima oleh pelaku KIA melalui program Desa Golo Wangkung. Lalu meneliti apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat pada evaluasi kebijakan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) studi kasus pada ibu hamil di Puskesmas Lengko Ajang.

Fokus penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan fokus penelitian dan dengan menggunakan teori menurut William N Dunn untuk mengukur keberhasilannya melalui tingkat kesehatan ibu dan anak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah salah satu desa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur di Puskesmas Lengko Ajang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Evaluasi Kebijakan Program KIA Studi Kasus Pada Ibu Hamil di Puskesmas Lengko Ajang

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori model evaluasi kebijakan menurut William N Dunn. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat dari keberhasilan efektivitas program melalui enam indikator, diantaranya yaitu:

a) Efektivitas

Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan menggunakan teori William N Dunn di Puskesmas Lengko Ajang Kecamatan Congkar dapat dikatakan belum berhasil secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak kendala antara lain akses transportasi atau jalan yang tidak baik, ada beberapa wilayah kerja yang jaringan atau sinyal belum stabil. Tetapi tenaga kesehatan dari pihak puskesmas yang terlibat dalam pelaksanaannya, seperti bidan, farmasi, staff aboratorium, serta pihak puskesmas setiap bulan aktif dalam memberikan sosialisasi.

b) Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per

unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori Wiliam N Dunn yaitu variable efisiensi, dapat disimpulkan bahwa program ini sudah efisien karena program KIA atay ibu hamil sudah ditangani dengan baik. Dan untuk sosialisasi menggunakan social media sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas Lengko.

c) Kecukupan

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori Wiliam N Dunn dapat disimpulkan bahwa variabel kecukupan di Puskesmas Lengko Ajang dapat dikatakan sudah optimal dikarenakan hampir setiap desa sudah memiliki sarana kesehatan dan tersedianya pemberian TTD pada remaja oleh pihak puskesmas serta menurunnya angka kematian ibu dan anak dari tahun 2019-2021 sama dengan 0%. Namun demikian fasilitas pendukungnya masih perlu dilengkapi atau ditambah.

d) Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Berdasarkan hasil penelitian sudah diterima dengan cukup baik oleh masyarakat pihak Puskesmas Lengko Ajang sudah berusaha untuk membuat strategi dan inovasi untuk menekan kematian ibu dan anak salah satu program yang dilaksanakan adalah sosialisasi KIA ke masyarakat.

e) Responsivitas

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui kriteria responsivitas, yang dianggap sangat penting karena analisis ini dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan). Keberhasilan kebijakan akan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Wiliam N Dunn yaitu variable responsivitas selalu menerima kritikan dan saran dari masyarakat demi peningkatan dalam pelayanan di Puskesmas Lengko Ajang yang sudah efektif dan dikatakan berhasil.

f) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Wiliam N Dunn yaitu variable ketepatan mengatakan bawah program ini sudah efektif dan tepat sasaran. Sedangkan menurut hasil wawancara Ibu Yuliana dan Ibu Elfrida menyatakan bawah kami selaku penyelenggara program yaitu program KIA memberikan makanan tambahan seperti susu, bubur, dan vitamin. Kami

berharap program tersebut bisa membantu ibu hamil.

2. Faktor Pendukung Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Faktor pendukung yaitu adanya evaluasi kebijakan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) studi kasus pada ibu hamil di Puskesmas Lengko Ajang Kecamatan Congkar yang dianggap sangat penting. Karena adanya faktor pendukung tersebut sebagai kebijakan program kesehatan ibu dan anak dapat berjalan dengan lancar. Pihak tenaga puskesmas juga mendukung program tersebut mulai dari dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Faktor pendukung lainnya yaitu pihak puskesmas juga sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

3. Faktor Penghambat Kebijakan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Faktor penghambat kebijakan program KIA, diantaranya:

- a) Pihak masyarakat kurang tertarik ikut program KIA terutama ibu hamil.
- b) Faktor transportasi yang masih kurang mendukung yaitu banyak jalan yang masih rusak sehingga menghambat proses sosialisasi program KIA.
- c) Jaringan di lokasi masih kurang bagus sehingga ketika ingin menyampaikan program lewat media sosial menjadi lama, karena terkendala jaringan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori Wiliam N. Dunn di Puskesmas Lengko Ajang terkait program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), maka dapat dikatakan belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Lengko Ajang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur.

Berdasarkan indikator efektivitas yang dianalisis menggunakan teori Wiliam N Dunn di Puskesmas Lengko Ajang, hasil penelitian menjelaskan bahwa pihak

masyarakat kurang tertarik mengikuti program KIA terutama ibu hamil, faktor transportasi yang masih kurang mendukung yaitu banyak jalan yang masih rusak sehingga menghambat proses sosialisasi program KIA, dan jaringan di lokasi masih kurang bagus sehingga ketika ingin menyampaikan program lewat media sosial lama, karna terkendala jaringan. Tetapi tenaga kesehatan dari pihak puskesmas terlibat dalam pelaksanaannya seperti bidan, farmasi, staff laboratorium, serta pihak puskesmas yang setiap bulan aktif memberikan sosialisasi.

Sedangkan untuk indikator efisiensi dapat dikatakan sudah efisien karena program KIA atau ibu hamil sudah ditangani dengan baik. Untuk sosialisasi menggunakan social media sudah dilakukan oleh pihak puskesmas. Bagi indikator kecukupan yang berdasarkan analisis menggunakan teori Wiliam N Dunn yaitu di Puskesmas Lengko Ajang dapat dikatakan sudah optimal dikarenakan bawah adanya pemberian TTD pada remaja oleh pihak puskesmas serta untuk angka kematian ibu dan anak dari tahun 2019-2021 telah mencapai angka 0.

Berdasarkan analisis menggunakan teori Wiliam N. Dunn yaitu variable perataan di Puskesmas Lengko Ajang dikatakan belum cukup diterima dengan baik karena masih terdapat kasus kematian pada bayi. Berdasarkan analisis menggunakan teori Wiliam N. Dunn yaitu variable responsivitas bahwa kebijakan ini selalu menerima kritikan dan saran dari masyarakat demi peningkatan dalam pelayanan. Berdasarkan analisis menggunakan teori Wiliam N. Dunn yaitu variable ketepatan mengatakan bawah kebijakan ini sudah tepat.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peneliti memberikan saran kepada Puskesmas Lengko Ajang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur diantaranya saran dari pihak puskesmas kepada pemerintah daerah yang meliputi:

- a) Diharapkan untuk memperbaiki akses jalan di daerah Lengko Ajang yang bertujuan memperlancar program sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- b) Merekomendasikan pemerintah daerah membangun tower jaringan untuk memperlancar sosialisasi lewat social media.
- c) Faktor transportasi yang masih kurang mendukung yaitu banyak jalan yang masih rusak sehingga menghambat proses sosialisasi program KIA.
- d) Jaringan di lokasi masih kurang bagus sehingga ketika ingin menyampaikan program lewat media sosial lama, karena terkendala jaringan.

REFERENSI

- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 10–19.
- Hadi, K. (2018). Pengembangan Model Problem Based Learning Berbasis Kearifan Lokal Pada Materi Keanekaragaman Hayati Kelas X di Kabupaten Aceh Selatan. *Bionatural: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 4(2), 65–88.
- Prawira, I. F. A., & Camela, M. (2018). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham (Studi Pada Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2012-2015). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 511–522.
- Rindi, K., Dewi, L. P. M. S. A., Sari, D. A. P., & Awitiana, P. P. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Bumdes Teja Kusuma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(1), 23–44.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 11(1), 86 – 99.
- Sugiyono, L. P., & Subandriani, D. N. (2014). Gambaran Pengetahuan, Sikap, Praktik, Serta Identifikasi Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus Aureus Pada Penjamah dan Makanan di PT PSA (Pelita Sejahtera Abadi). *Jurnal Riset Gizi*, 2(2), 56–66.
- Whoqol. (1995). Penilaian Kualitas Hidup Organisasi Kesehatan Dunia: Kertas Posisi dari Organisasi Kesehatan Dunia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kedokteran*, 41(10), 1403–1409.